



**PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN BUKIT SANGKAL KECAMATAN
KALIDONI KOTA PALEMBANG**

DISUSUN OLEH :

NAMA : WILFA RAMADHAN

NIM : 20.11.055

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Wilfa Ramadhan, 2024, "Distribution of Prosperous Rice Social Assistance (Rastra) in Community Poverty Alleviation in Bukit Sangkal Village, Kalidoni District, Palembang City. Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Mr. Ahmad Yani Kosali, S.E., S.H., MM as Supervisor I and Mrs. Aryanisila, S.E., MM., M.Si as Supervisor II.

Distribution of Prosperous Rice Social Assistance (Rastra) in Community Poverty Alleviation in Bukit Sangkal Village, Kalidoni District, Palembang City. This study aims to analyze and test how the Distribution of Prosperous Rice Social Assistance (Rastra) is in Community Poverty Alleviation in Bukit Sangkal Village, Kalidoni District, Palembang City. The research method uses qualitative descriptive and uses data reduction analysis methods, data validity, and drawing conclusions.

Research Results the results of the research conducted by the author on the analysis of the Distribution of Prosperous Rice Assistance (Rastra) in Community Poverty Alleviation in Bukit Sangkal Village, Kalidoni District, Palembang City, it can be concluded that it has been implemented well, this can be seen from concept one, namely the Purpose of using social assistance, Providers of social assistance, Recipients of social assistance, Forms of social assistance, which are distributed are implemented very well and concept two Reducing the Burden of Expenditure of the Poor Increasing the Ability and Income of the Poor. Developing and Guaranteeing, Sustainability of Micro and Small Businesses, Synergizing Policies and, Poverty Alleviation Programs are also implemented well.

Keywords: Distribution of Prosperous Rice Social Assistance, Poverty Alleviation



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara di Asia Tenggara dengan Jumlah Penduduk terbanyak yaitu lebih dari 273 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu maka Indonesia telah mengalami kondisi sosial masyarakat yang beragam. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak kondisi sosial yang terdapat di masyarakat dan telah menjadi permasalahan yang krusial sejak orde lama hingga sekarang.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau dalam satu keluarga tidak mampu memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dalam konteks kebutuhan sehari-hari dan pendapatan (*Todaro dan Smith, 2006:231; Kuncoro, 2003:101*). Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia, dimana pada setiap tahunnya angka kemiskinan semakin meningkat. Dijelaskan menurut *Badan Pusat Statistik (BPS)* yang mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan melonjak menjadi 10,14% dari total populasi Nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka angka kemiskinan di Indonesia ini meningkat 0,36% atau naik 1,12 juta orang. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah, karena angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan berbagai cara agar dapat menurunkan angka kemiskinan (*Itang Itang, 2015*).

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang menjalankan pengaturan negara telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan selanjutnya diimplementasikan kepada masyarakat. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari keputusan yang terdapat di dalam kebijakan itu sendiri. *Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975:462-474)* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adanya konsep desentralisasi di Indonesia yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonomi untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dalam mengurus masyarakat di daerahnya termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah



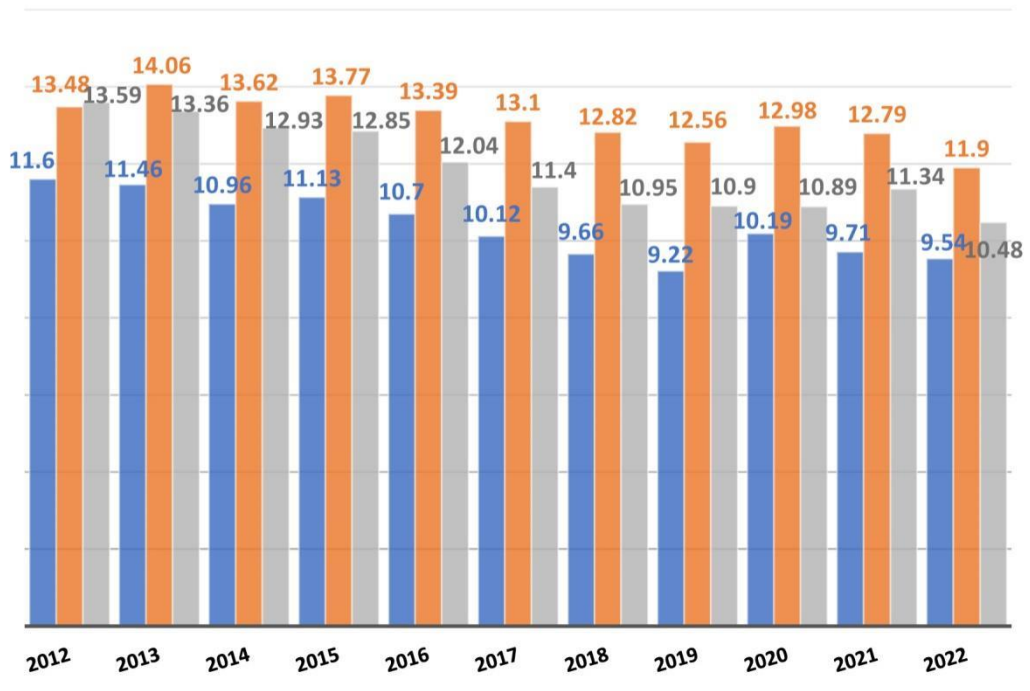
daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam pengimplementasian berbagai program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, salah satunya adalah Kelurahan Bukit Sangkal.

Palembang merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera, dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,686 juta penduduk tercatat ada 11,34 % persen penduduk miskinnya. Seorang dapat dikategorikan miskin apabila.

Berada diambang atau di bawah garis kemiskinan, di tingkat nasional garis kemiskinan sebesar Rp.486.168 per kapita per bulan. Untuk di tingkat provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.457,455.00/bulan, sedangkan untuk di Palembang sebesar Rp.567,518.00/bulan. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan dan Palembang yang dapat dilihat dari grafik ini.

Grafik 1

PERBANDINGAN PENDUDUK MISKIN
INDONESIA, SUMSEL, PALEMBANG (PERSEN)



Sumber : Badan Statistik Indonesia, 2023

Grafik di atas merupakan perbandingan dari persentase penduduk miskin di Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang

yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah dari



persentase penduduk miskin yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang terhadap jumlah penduduknya.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani dengan usaha yang maksimal agar masyarakat Indonesia dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Melihat keadaan dari sebagian penduduk Indonesia yang belum memiliki kehidupan yang layak serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan sosial Rastra di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kelurahan Bukit Sangkal dilandaskan pada Pedoman Umum Bantuan Sosial Rastra (Pedoman Bansos Rastra). Di dalam Pedoman tersebut terlampir mekanisme pelaksanaan yang meliputi pembuatan panduan pelaksanaan, penetapan pagu, penerima manfaat, perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM), peluncuran dan sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi (PE), penyaluran, dan pembiayaan.

Kelurahan Bukit sangkal adalah salah satu kelurahan dari kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan jumlah penduduk 30.092 dan

lapangan pekerjaan sebagai buruh dengan pendapat rata-rata.

Menurut Walikota Palembang pertumbuhan ekonomi Palembang pada 2021 sebesar 3,17 persen, dan pertumbuhan ekonomi ini naik signifikan setelah mengalami kontraksi pada tahun lalu sebesar 0,25 persen, Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp. 297.546/orang/bulan.

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) untuk mendukung kebijakan yang dibuat untuk masyarakat miskin. Tujuan dilaksanakan program ini guna melindungi penduduk yang tergolong miskin sehingga mereka dapat menikmati kelayakan dalam hidup mereka. Program ini diharapkan untuk jangka panjang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya tidak mengalami kemiskinan yang ada di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Bantuan Rastra yang diberikan pemerintah mengacu pada Data Pelayanan Sosial Terpadu, namun hanya mereka yang memenuhi syarat yang terdaftar dalam Data Pelayanan Sosial Terpadu (DTKS) dan berhak menerima bantuan tunai atau non tunai, sehingga seluruh bantuan disalurkan secara lokal. tidak meresap ke dalam masyarakat secara keseluruhan. jumlah penerima Bantuan beras sejahtera yang diberikan pada kelurahan bukit sangal kecamatan kalidoni dapat dilihat tabel 1 di bawah ini :



Tabel 1
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera

No	Periode / Tahun	Jumlah Penerima / Kartu Keluarga
1	2021	80
2	2022	100
3	2023	200

Sumber: Dinas Sosial DTKS Kota Palembang, 2023

Tabel diatas menunjukkan jumlah penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera Setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima, namun Kenyataan pelaksanaan Bansos Rastra di atas masih mendapat keluhan dari kelompok masyarakat khususnya kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan program bantuan sosial, seperti kuantitas dan kualitas beras (natura) yang diterima oleh KPM, dan nama penerima dari Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Namun Kenyataan Pelaksanaan Bansos Rastra di atas masih mendapat keluhan dari kelompok masyarakat khususnya kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan program bantuan sosial, seperti kuantitas dan kualitas beras (natura) yang diterima oleh KPM, dan nama penerima dari Daftar Penerima Manfaat (DPM).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) Dalam**

Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu :

Bagaimanakah

Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

Untuk Menganalisis dan menguji Bagaimanakah Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat seperti yang penulis paparkan dibawah ini :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pola pikir penelitian, khususnya dalam memahami tentang pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) dalam kemiskinan masyarakat Kelurahan Bukit Sangkal kecamatan kalidoni kota palembang.



Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
Secara akademis dapat memperluas wawasan khususnya tentang Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
2. Bagi Sekolah Tinggi STIA Satya Negara
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Pendidikan khususnya mengenai Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Penanggulangan kemiskinan masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
3. Bagi Kantor Kelurahan Bukit Sangkal
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi staf dan pegawai di Kantor Lurah Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang terhadap Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra). Selain itu juga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi peningkatan Pemberian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) Terhadap Kemiskinan Masyarakat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendistribusian

Konsep pendistribusian merujuk pada proses penyaluran atau penyebaran barang, jasa, atau informasi dari produsen atau sumber asal ke konsumen atau pengguna akhir. Pendistribusian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen rantai pasokan (supply chain management) dan pemasaran. Pendistribusian dapat mencakup berbagai aktivitas, seperti penyimpanan, transportasi, pengelolaan stok, dan pengaturan jaringan distribusi.

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Adapun Berikut beberapa konsep utama dalam pendistribusian:

1. Saluran Distribusi:

Merupakan jalur yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Saluran ini dapat terdiri dari



beberapa pihak, seperti grosir, agen, pengecer, atau distributor. Saluran distribusi dapat dibagi menjadi tiga jenis utama: langsung, tidak langsung, dan campuran.

2. Fungsi Pendistribusian:

Pendistribusian tidak hanya mencakup pengiriman produk fisik, tetapi juga mencakup layanan tambahan seperti penyimpanan, pemeliharaan stok, pengemasan, penanganan barang, dan layanan purna jual.

3. Strategi Pendistribusian:

Produsen perlu menentukan strategi yang tepat untuk mendistribusikan produk mereka. Beberapa strategi termasuk distribusi intensif (menargetkan distribusi produk secara luas), distribusi eksklusif (membatasi distribusi produk pada sejumlah outlet tertentu), dan distribusi selektif (memilih beberapa lokasi atau saluran distribusi yang dianggap paling efektif).

4. Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management):

Pendistribusian merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasokan, yang melibatkan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan produk sampai ke konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

5. Teknologi dalam Pendistribusian:

Teknologi memainkan peran besar dalam memfasilitasi pendistribusian yang lebih efisien, seperti sistem manajemen gudang (WMS), sistem manajemen transportasi (TMS), dan platform e-

commerce yang memungkinkan pelacakan dan pengelolaan pengiriman secara real-time.

6. Distribusi Digital:

Dalam konteks digital, distribusi tidak hanya terbatas pada barang fisik tetapi juga mencakup penyebaran konten digital seperti software, musik, video, dan layanan melalui internet.

B. Pengertian Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, pemerintah sebagai pemberi bantuan sosial dan masyarakat sebagai penerima

d. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan sosial pangan natura (beras) yang dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Di Kelurahan Bukit Sangkal sendiri, bantuan sosial Rastra pada awalnya bersumber pada APBN hingga pada tahun 2018, anggaran bantuan sosial Rastra beralih ke APBD. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang kemudian menjadi acuan oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, dan pemerintah daerah maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program.

Tabel 2

Jumlah Penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera



Kota Palembang

No	Kecamatan	Periode Jumlah Penerima Per Kepala Keluarga				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ilir Barat I, Ilir	26.345	26.342	9.803	35.241	6.113
2	Ilir Barat II	24.890	29.889	16.063	36.688	5.322
3	Ilir Timur I	17.426	18.447	6.687	20.060	3.860
4	Ilir Timur II	19.888	21.434	8.372	27.941	4.607
5	Ilir Timur III	18.727	18.840	8.894	22.212	4.128
6	Bukit Kecil	11.394	13.086	4.570	14.813	2.656
7	Bukit tinggi	28.837	31.829	11.820	42.855	6.728
8	Kuning	17.218	22.282	7.799	25.550	4.752
9	Kalidoni	28.531	31.881	14.924	36.000	6.583
10	Sako	20.620	20.357	10.222	25.862	4.674
11	Sematang Borang	11.504	13.126	9.542	18.969	2.734
12	Alang-Alang Lebar	13.622	14.552	4.852	20.479	2.962
13	Gandus	27.967	34.379	13.501	37.016	6.313
14	Kertapati	46.833	51.778	35.924	59.691	11.017
15	Plaju	36.856	37.470	16.847	43.600	9.401
16	Jakabaring	43.039	43.695	28.112	54.711	8.995

Sumber: Dinas Sosial DTKS Kota Palembang, 2023

C. Indikator Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Program Bantuan Sosial adalah

pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,



meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, adapun indikator yang diambil pada pasal 4 yaitu :

1. Jumlah Penerima Manfaat
2. Distribusi secara Merata
3. Keberlanjutan Ekonomi
4. Dampak Gizi

D. Masyarakat Miskin

Secara etimologis, masyarakat berasal dari bahasa arab “musyarak” yang berarti hubungan atau interaksi. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama menetap di suatu wilayah dan saling berinteraksi karena adanya ketergantungan dan rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda. Beberapa ahli mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam mendefinisikan kemiskinan.

Menurut *Parsudi Suparlan* (2012) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adapun menurut *Badan Pusat Statistik* kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya berarti mengalami kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Penggunaan tolak ukur yang berbeda-beda dalam menakar kemiskinan, menghasilkan pengertian yang berbeda pula tentang siapa saja yang pantas dikatakan miskin. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah menetapkan suatu standar bahwa yang termasuk masyarakat miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam konteks keindonesiaan, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah beras. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan beras mereka digolongkan dalam kelompok miskin.

E. Jenis-jenis Kemiskinan

Menurut *Chamber dalam Khomsan, dkk* (2015) berdasarkan kondisi, kemiskinan dibagi menjadi 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah :

- a. Kemiskinan absolut, bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan pokok dengan pemenuhan standar kesejahteraan.



- Bentuk ini yang paling banyak dipakai sebagai konsep menentukan kriteria seseorang yang disebut miskin.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Daerah yang belum terjangkau program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal sebagai daerah tertinggal.
 - c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
 - d. Kemiskinan structural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan

Kemiskinan structural merupakan bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial. Bentuk kemiskinan ini juga dianggap paling banyak menimbulkan ketiga bentuk kemiskinan lainnya menurut *Jarnasy dalam Elvira dkk (2018)*. Menurut *Suryawati dalam Elvira, dkk (2018)* selain jenis kemiskinan berdasarkan bentuknya terdapat juga jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapaun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah :

- a. Kemiskinan alamiah, kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan SDA dan minimnya pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah tersebut pada umumnya belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan buatan, kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

F. Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan yang dikembangkan oleh BPS adalah menggunakan garis kemiskinan pengeluaran baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Masing-masing komponen diberi bobot dan dijumlahkan. Pemberian bobot masing-masing komoditi harus jelas, konsisten dan yang terpenting harus sesuai fakta di masyarakat.

United Nations Development Program (UNDP) sejak tahun 1990, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan tentang pembangunan



manusia di berbagai negara yaitu Human Development Report. Salah satu yang diperkenalkan adalah indeks kemiskinan manusia (Human Poverty Index/HPI) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Namun HPI tidak dapat mengidentifikasi individu ataupun rumah tangga miskin. Untuk menyempurnakan hal tersebut, berkembang pendekatan kemiskinan multidimensional (*Multidimensional Poverty Index/MPI*) yang menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui tiga dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Menurut Hanandita dan Tampubolon dalam Mauna dkk (2018) lebih dari 60 persen penduduk yang dinyatakan tidak miskin oleh kemiskinan moneter diidentifikasi sebagai penduduk miskin dalam kemiskinan multidimensi. Penggunaan untuk menilai inklusivitas pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan barang public meskipun disisi lain masih ada tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

G. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu masyarakat miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau berkreatifitas, menjadikan hidup mereka miskin.

2. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu masyarakat miskin. Bentuk-bentuk pengaruh dari luar diri masyarakat miskin antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
- b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal.
- d. Kebijakan perbankan dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro.
- e. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal seperti zakat.
- f. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
- g. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana.
- h. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
- i. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- j. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

F. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

G. Indikator Penggulangan Masyarakat Miskin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang percepatan Penanggulangan

Kemiskinan pasal 3 strategi Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

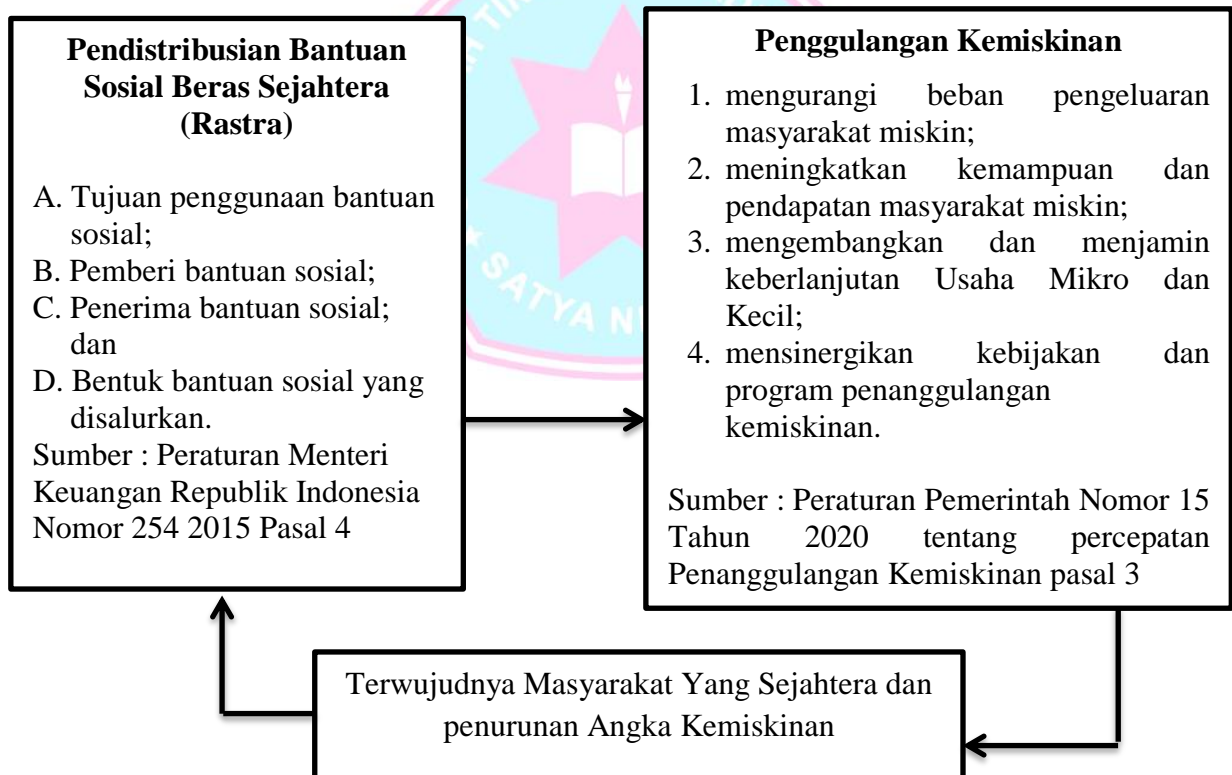
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

H. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”.Kerangka penelitian ini adalah :

Gambar 2
Kerangka Berpikir





**BAB III
METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini Deskriptif Kualitatif. Menurut Nawawi (2003:45), Pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa dengan tujuan menggunakan sifat-sifat data yang diperoleh serta menginterpretasikannya dalam bentuk deskripsi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang

dimaksudkan untuk memahami arti setiap variable atau konsep penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variable atau konsep. Akan tetapi, definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama (Mertha 2020:45). Operasionalisasi dan konsep dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4
Perasionalisasi Konsep**

No	Konsep	Indikator
1	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2015 Pasal 3	a. Tujuan Penggunaan Bantuan Sosial; b. Pemberi Bantuan Sosial; c. Penerima Bantuan Sosial; Dan d. Bentuk Bantuan Sosial Yang Disalurkan.
2	Pengulangan Kemiskinan Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 3	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan Kemiskinan.

C Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan



mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019:296). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proposal penelitian ini, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti. Menurut Miles & Huberman (2014:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

D. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono dalam Jaya (2020:166-168) mengemukakan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

1. Tujuan Penggunaan Bantuan Sosial

Bantuan sosial bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, seperti masyarakat miskin atau rentan, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan Program Beras Sejahtera (Rastra) dapat membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentang atau mengalami kesulitan

2. Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian Bantuan Sosial adalah individu, organisasi, atau lembaga yang memberikan bantuan dalam bentuk materi atau non-materi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial ini bisa berupa uang, makanan, pakaian, obat-obatan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi, sosial, atau psikologis kelompok yang kurang mampu atau terkena bencana.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Distribusi Secara merata sudah sepenuhnya terlaksana dengan secara maksimal namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial sudah dilakukan hal ini terlihat dari pemberian bantuan didistribusikan secara merata sudah sepenuhnya dilakukan dan meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

3. Penerima bantuan sosial

Penerima Bantuan Sosial adalah individu, keluarga, atau kelompok yang menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya karena mereka berada dalam kondisi yang membutuhkan. Penerima ini umumnya adalah masyarakat yang termasuk dalam kategori rentan atau kurang mampu, sehingga mereka memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.



Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerima program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) telah memberikan dampak yang signifikan dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerima bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) sudah dilakukan hal ini terlihat dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) telah memberikan dampak yang signifikan dalam membantu masyarakat miskin di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

4. Bentuk Bantua dan Sosial Yang Disalurkan

Bantuan sosial (bansos) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi kepada individu atau kelompok yang membutuhkan untuk meringankan beban ekonomi atau sosial.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka penulis dapat bahwa bentuk bantuan sosial yang disalurkan dalam Program bantuan sosial beras sejahtera di Kantor Kelurahan Bukit Sangkal sudah baik, bantuan yang diberikan berupa beras yang diberikan kepada masyarakat dipastikan memiliki kualitas beras yang mencukupi gizi mereka dan dapat mengurangi kelaparan masyarakat

Dengan demikian dapat disimpulkan Bentuk Bantuan Sosial Yang Disalurkan sudah dilakukan hal ini terlihat dari bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat dipastikan memiliki kualitas beras

yang mencukupi gizi mereka dan dapat mengurangi kelaparan masyarakat.

B. Penanggulangan Kemiskinan

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin . Artinya Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang di mana harapan program ini bisa mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin sudah dilakukan hal ini terlihat dari Program bantuan sosial beras sejahtera di Kantor Kelurahan Bukit Sangkal dapat membantu masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran dan bisa menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk keperluan yang lain.

2. Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Menyediakan pelatihan dan dukungan bagi masyarakat miskin untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dalam Program



bantuan sosial beras sejahtera di Kantor Kelurahan Bukit Sangkal belum adanya program untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin untuk Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin.

3. Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastru) dalam Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Program bantuan sosial beras sejahtera di Kantor Kelurahan Bukit Sangkal tidak ada kaitanya dengan usaha mikro dan kecil.

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan Kemiskinan artinya Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastru) Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang di mana pemerintahan kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai kebijakan program penanggulangan Kemiskinan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastru) dalam Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan Kemiskinan sudah terlaksana hal ini

dapat dilihat Kelurahan Bukit Sangkal terus berusaha untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai kebijakan program penanggulangan Kemiskinan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastru) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa telah dilaksanakan dengan baik hal ini dilihat dari konsep satu yaitu Tujuan penggunaan bantuan sosial, Pemberi bantuan sosial, Penerima bantuan sosial, Bentuk bantuan sosial, yang disalurkan dilaksanakan dengan sangat baik dan konsep dua Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin. Mengembangkan Dan Menjamin, Keberlanjutan Usaha Mikro Dan Kecil, Mensinergikan Kebijakan Dan, Program Penanggulangan Kemiskinan juga telaksana dengan baik

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastru) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota



Palembang Diharapkan pelaksanaan tetap mempertahankan pelaksanaan dan lebih ditingkatkan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, & Zelvian, I. (2021). Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management & Motivasi Kerja. CV. Penerbit Qiara Media.
- Berry, & David. (2003). Pokok - Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Rajawali Pers.
- Gunawan, A., Sucipto, I., & Suryadi, S. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pada Kantor Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Vol. 3 No. 1 (2020): Ikraith-Ekonomika Vol 3 No 1 Bulan Maret 2020. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-ekonomika/article/view/631>
- Haq, A. N. N., & Prabawati, I. (2022). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DESA SEPANDE, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO. Vol 10 No 4 (2022). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47993>
- Hasibuan, & S.P, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. (EdisiRevisi). Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, M. (2017). Analisis Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Kantor Pemerintahan Kecamatan Lubuk Baja Batam. Vol 2 No 3 (2017): Agustus. [Http://Www.Akrabjuara.Com/Index.Php/Akrabjuara/Article/View/47](http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/47)
- Soekanto, & Soejono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak ke sebelas. Prananda Media Group.
- Yulianty, P. D., Qodriah, S. L., Kurniawan, P., & Indriyanti, H. (2021). Pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Elfaatih Global Indonesia. [Ejournal.Widyamataram.Ac.Id/Index.Php/j-Mae](http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae), Vol.2, No.2 (2021): Desember 2021. <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae/article/view/402/270>
- De Pora, Antonio. 2011. Remunerasi, Kompensasi dan Benefit. Jakarta: Rana Pustaka
- Anonim. (1995). Oxford Advanced Learner's Dictionary. Inggris: Oxford University Press.
- Putri, E. N. (2019). Peranan Motivasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Bandung Super Model Malang). Jurnal Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Islam Malang , 26-32.
- Hafiza, N. S., Shah, S. S., Jamsheed, H., & Zaman, K. 2011. Relationship Between Rewards and Employee's Motivation in the Non-profit Organization of Paksitan. Business Intelligence Journal. Vol.4, No.2



A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2014. Evaluasi Kinerja SDM. Cetakan ke enam. Bandung Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2018. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV.Mandar Maju.

Badriyah, Mila, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Bradler, C., Dur, R., Susanne, N., & Non, A. (2013). Employee recognition and performance: a field experiment. Tinbergen Institute Discussion Paper , 38 (7), 1-30.

Wardan Khusnul. (2020). Motivasi Kerja Guru Dalam Pembelajaran (Rianto. Rante Rerung (ed.); 1st ed.). Penerbit Media sains Indonesia.

Hasibuan, Malayu S.P, 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.

Safitriani (2016) Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahragadi Kab. Jeneponto.

Mersa Candra Pratama (2016) Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung